

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring meningkatnya kebutuhan informasi oleh masyarakat, pemerintah dituntut agar dapat mengembangkan inovasi sehingga mampu menyediakan informasi yang semakin cepat, mudah, dan murah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang bagi pemerintah dan lembaga publik untuk meningkatkan pelayanan informasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.¹ Inovasi dalam pengelolaan informasi publik ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.²

Di era digital, keterbukaan informasi tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari strategi dalam membangun kepercayaan publik.³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga publik dituntut tidak hanya memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memastikan informasi dapat diakses secara efektif oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud dari prinsip *good governance* yang menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pelayanan publik, tidak

¹ Eko Yudianto Yunus, Nadinda Alvionita, Fitra Akbar Maulana, & Muhammad Teguh Firmansyah. (2024). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Sistem Pemerintahan Lokal Di Era Digital. *Journal Of Innovation Research And Knowledge*, 4(5), 3179–3190. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8787>

² Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1779-1787. <https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367>

³ Sepriano, S., Hikmat, A., Munizu, M., Nooraini, A., Sundari, S., Afiyah, S., ... & Indarti, C. F. S. (2023). *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

terkecuali di sektor pendidikan. Di Indonesia, keterbukaan terhadap akses data sebagai salah satu kebebasan bersama yang tertuang dalam berbagai regulasi seperti UUD 1945 dan peraturan lainnya menunjukkan bahwa hak atas informasi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.⁴ Namun, dalam praktiknya, implementasi keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan masih belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks ini, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan elemen krusial dalam menyelenggarakan layanan informasi publik yang transparan dan partisipatif, sebagai lembaga yang menjembatani badan publik dan masyarakat pengguna informasi. Pasal 1 (9) UU KIP menyatakan bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertugas untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau melayani informasi pada instansi Pemerintah.” Sekolah adalah salah satu lembaga publik, harus melaksanakan amanat undang-undang, yaitu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).⁵

Fenomena keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan tingkat SMA Negeri di DKI Jakarta, menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di lapangan. Secara normatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan telah menginstruksikan seluruh SMA Negeri untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui pembentukan PPID, sekolah diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga membangun budaya transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan mutu layanan pendidikan.

⁴ Hansah, N., & Fachrudin, I. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Interaksi: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 38-48. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5229>

⁵ Indra, I., & Waskito, W. (2024). Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9018-9027. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7803>

Kebijakan ini semakin diperkuat melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) *E-Monitoring* dan *Evaluasi (E-Monev)* Lingkup Sekolah Negeri yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada Jumat, 26 Juli 2024. Kegiatan yang dihadiri ratusan kepala SD, SMP, dan SMA Negeri di Jakarta ini bertujuan mempersiapkan badan publik sekolah untuk mengikuti pelaksanaan E-Monev 2024 pada Agustus mendatang. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Purwosusilo, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mewujudkan tata kelola akuntabilitas dan transparansi dalam layanan pendidikan, terutama dengan mendorong publikasi informasi melalui *website* resmi sekolah agar masyarakat memperoleh akses informasi yang mudah.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin, juga menegaskan pentingnya setiap sekolah negeri, mulai dari SD hingga SLTA, memiliki struktur PPID dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi publik.⁷ Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Agus Wijayanto Nugroho, menambahkan bahwa PPID di sekolah memiliki tanggung jawab penting dalam mengklasifikasikan informasi publik menjadi tiga kategori, yaitu informasi publik yang bersifat serta-merta, berkala, dan setiap saat serta menentukan informasi yang dikecualikan melalui mekanisme uji konsekuensi.

Namun demikian, hasil penelusuran awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata di tingkat satuan pendidikan. Masih terdapat sekolah yang belum menampilkan informasi terkait PPID secara jelas pada *website* resmi

⁶ Karyati, A. (2024). *KI dan Disdik DKI dorong sekolah negeri bentuk PPID*. Berita Jakarta. Diakses pada 3 Agustus 2025, dari <https://www.beritajakarta.id/read/138469/ki-dan-disdik-dki-dorong-sekolah-negeri-bentuk-ppid>

⁷ Karyati, A. (2024).

mereka, baik dari segi keberadaan struktur organisasi, dokumen pendukung, maupun mekanisme layanan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik nyata di lapangan.

Di sisi lain, berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, beberapa sekolah telah menunjukkan capaian yang cukup baik. Salah satunya adalah SMA Negeri 78 Jakarta yang memperoleh nilai 88,0 dengan kategori “menuju informatif”. Capaian ini menunjukkan bahwa secara administratif dan indikator penilaian, SMA Negeri 78 Jakarta telah memenuhi sebagian besar kriteria keterbukaan informasi publik.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi awal yang dilakukan peneliti secara mandiri terhadap kurang lebih 20 *website* resmi SMA Negeri di DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran tersebut, SMA Negeri 78 Jakarta termasuk dalam kategori sekolah yang memiliki kelengkapan informasi publik yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian sekolah lainnya, baik dari sisi ketersediaan dokumen maupun aksesibilitas informasi yang disajikan pada laman resmi sekolah.

Namun demikian, capaian tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi implementasi di lapangan, khususnya dalam aspek pelaksanaan peran PPID secara substantif. Pemilihan SMA Negeri 78 Jakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah ini menunjukkan kombinasi antara capaian penilaian yang relatif tinggi dan ketersediaan informasi publik yang cukup lengkap pada *website* resmi sekolah. Dibandingkan dengan sekolah lain yang juga telah menampilkan PPID, SMA Negeri 78 Jakarta memiliki keunggulan dari sisi kelengkapan dokumen, seperti keberadaan SK PPID, SOP layanan informasi, Daftar Informasi Publik (DIP), serta mekanisme permohonan informasi yang tersedia secara daring maupun luring. Hal ini menjadikan SMA Negeri 78 Jakarta sebagai kasus yang relevan untuk dikaji lebih dalam, khususnya untuk memahami apakah capaian tersebut telah sejalan dengan implementasi nyata di lapangan.

Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun secara tampilan dan kelengkapan informasi terlihat sudah memenuhi standar, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan peran PPID belum sepenuhnya optimal dalam praktiknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana peran PPID dijalankan tidak hanya sebagai pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai fungsi manajerial dalam pengelolaan informasi publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di SMA Negeri 78 Jakarta. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek formal dan administratif, tetapi juga pada implementasi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan sekolah, serta menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di sektor pendidikan.

Dari sudut pandang peneliti, kajian mengenai implementasi PPID di lingkungan sekolah menjadi penting karena keterbukaan informasi publik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola lembaga pendidikan. Dalam praktiknya, transparansi di tingkat sekolah masih sering dipahami sebatas pemenuhan administratif, padahal pengelolaan informasi publik yang baik menuntut adanya peran aktif, koordinasi yang efektif, serta kemampuan manajerial dalam menyajikan informasi yang akurat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya melihat kesesuaian antara kebijakan dan implementasi, tetapi juga memahami secara lebih mendalam bagaimana peran PPID dijalankan dalam konteks nyata di lingkungan sekolah.

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Mengelola Informasi Publik di SMA Negeri 78 Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk mendukung pencapaian fokus utama tersebut, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa sub fokus, yaitu:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Layanan Informasi Publik oleh PPID di SMA Negeri 78 Jakarta.
2. Koordinasi dan Konsolidasi dalam Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID di SMA Negeri 78 Jakarta.
3. Verifikasi dan Penyediaan Informasi Publik oleh PPID di SMA Negeri 78 Jakarta.
4. Evaluasi dan Pembinaan terhadap Pelaksanaan Kebijakan Informasi Publik di SMA Negeri 78 Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus yang telah ditetapkan, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab beberapa pertanyaan utama yang berkaitan dengan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Mengelola Informasi Publik di SMA Negeri 78 Jakarta. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan dan penerapan kebijakan layanan informasi publik oleh PPID di SMA Negeri 78 Jakarta?
2. Bagaimana koordinasi dan konsolidasi yang dilakukan PPID dalam pengelolaan informasi publik di SMA Negeri 78 Jakarta?
3. Bagaimana proses verifikasi dan penyediaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di SMA Negeri 78 Jakarta?
4. Bagaimana bentuk evaluasi dan pembinaan yang dilakukan PPID terhadap pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik di SMA Negeri 78 Jakarta?

D. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam mengelola informasi publik di SMA Negeri 78 Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait tata kelola informasi publik di lingkungan satuan pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang implementasi keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di sektor pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dalam memahami praktik pengelolaan informasi publik oleh PPID di lingkungan sekolah.

b. Bagi Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik dalam bidang manajemen pendidikan, terutama pada aspek pengelolaan informasi publik dan transparansi institusi pendidikan.

c. Bagi PPID dan Pihak Manajemen SMA Negeri 78 Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi PPID dan pihak manajemen sekolah dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperbaiki mekanisme pelayanan informasi publik, meningkatkan koordinasi antarbagian,

serta memperkuat komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas publik di lingkungan sekolah.

d. Bagi Pemerintah atau Dinas Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah atau dinas pendidikan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas tata kelola informasi publik di sekolah. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, serta penguatan peran PPID di lingkungan pendidikan

e. Bagi Masyarakat dan Orang Tua Siswa

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari hak masyarakat khususnya orang tua siswa, tentang pentingnya keterbukaan informasi dalam lingkungan sekolah.

